

PENAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 1970 – 2013

Oleh: Ulul Azmi

(Di Bawah Bimbingan Dr. Lindayanti, M.Hum dan Dr. Mhd. Nur, MS)

ABSTRAK

Kajian tesis ini mengungkapkan tentang penambangan emas di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Pada tahun 2000 aktivitas penambangan emas marak di Limun. Pola dan teknik penambangan juga telah mengalami perubahan dari masa sebelumnya. Maraknya penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Limun didorong oleh perubahan dan perkembangan teknologi. Penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Limun menimbulkan berbagai persoalan yang bermuara pada konflik. Menyikapi persoalan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan. Pemerintah melarang masyarakat melakukan penambangan. Walaupun pemerintah melarang masyarakat melakukan aktivitas penambangan emas, tetapi masyarakat tetap menjalankan aktivitas ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, pertama heuristik atau pengumpulan sumber. Sumber yang digunakan adalah sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis didapatkan melalui studi kearsipan dan studi kepustakaan. Sumber lisan didapat melalui wawancara dengan orang-orang yang memiliki hubungan dan keterlibatan langsung dengan topik penelitian. Tahap kedua kritik, baik kritik eksteren maupun kritik interen. Tahap ketiga interpretasi merupakan analisa terhadap isi sumber dan hubungannya dengan fakta sehingga mendapat suatu gambaran sejarah yang objektif. Tahap keempat adalah historiografi merupakan tahap penulisan sejarah secara sistematis dan kronologis.

Pada tahun 1970-1999 perkembangan penambangan emas di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru yang bersifat sentralistis termasuk sektor pertambangan emas. Pada tahun 1970 masyarakat di Kecamatan Limun masih melakukan penambangan emas dengan model tradisional. Pada tahun 2000 model penambangan mengalami perubahan dan perkembangan, masyarakat melakukan penambangan emas menggunakan mesin. Dampak aktivitas penambangan kerusakan lingkungan, sosial, ekonomi dan politik. Pemerintah sebagai pemilik kebijakan mengeluarkan kebijakan, yang pada akhirnya bermuara kepada konflik. Konflik ini terjadi karena benturan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat penambang emas.